

Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Pada Masyarakat Desa Wisata Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Rusli Yusuf¹, Ruslan², Rayyan Wahyu Maulana³

^{1,2,3}Universitas Syiah Kuala

E-mail: rusliyusuf@yahoo.co.id¹, ruslan@unsyiah.ac.id², rayyanwahyumaulana07@gmail.com³

Abstract

The formation of an environmentally caring character through the village government and the Nusa Tourism Institute as well as Nusa Village community leaders is a general illustration where the development of environmentally caring attitudes and behavior can be started at the village level. The development of attitudes and behavior that cares about the environment nationally can of course start with development at the level of the smallest community unit, namely the village. This research aims to (1) identify the role of the Village Government and the Nusa Tourism Institute in forming an environmentally caring character in Nusa Village, Lhoknga District, Aceh Besar Regency. (2) To determine the role of community leaders in forming environmentally caring character in Nusa Village, Lhoknga District, Aceh Besar Regency (3) To explain the form of cooperation between the Village Government and the Nusa Tourism Institute with community leaders in forming environmentally caring character in Nusa Village, District Lhoknga, Aceh Besar Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive research type, the data sources in the research are 6 people consisting of the Village Head, Village Secretary, General Chair of the Nusa Tourism Institute, Head of the Nusa Tourism Institute's Guiding Division, Chair of the village tuha peut, and meunasah imam. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The results of this research show that the role of village government includes establishing and optimizing LPN performance, coordinating and deliberating between institutions, executing correspondence service programs, monitoring, facilitating and assisting cooperative relations between village and non-village institutions. Meanwhile, the LPN's role includes coordination and deliberation, implementation of socialization which includes door to door activities, mutual cooperation, empowerment of PKK women, reward and punishment regulations for providing hygiene facilities to the community, and organizing environmental events. Apart from that, the role of the meunasah imam includes providing socialization on environmental management procedures based on the Koran and hadith. Meanwhile, the village tuha peut has a role as supervisor and advisor so that all activities remain in accordance with customary, cultural, tradition and sharia values. Forms of cooperation between village government, LPN and community leaders include planning, implementation and checks and balances. So that environmental citizenship in Nusa Village, Lhoknga District, Aceh Besar Regency can be created and implemented well.

Keywords: Environmental Care, Nusa Village, Nusa Tourism Institute.

Abstrak

Pembentukan karakter peduli lingkungan melalui pemerintah desa dan Lembaga Pariwisata Nusa serta tokoh masyarakat Desa Nusa merupakan gambaran umum di mana pembinaan sikap dan perilaku peduli lingkungan dapat dimulai pada tingkat desa. Pembinaan sikap dan perilaku peduli lingkungan secara nasional tentunya dapat dimulai dalam pembinaan di tingkat kesatuan masyarakat terkecil, yaitu desa. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk (1) mengidentifikasi peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa dalam pembentukan karakter peduli lingkungan pada Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. (2) Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pembentukan karakter peduli lingkungan pada Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar (3) Untuk menjelaskan bentuk kerja sama Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa dengan tokoh masyarakat dalam pembentukan karakter peduli lingkungan pada Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sumber data dalam penelitian berjumlah 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Umum Lembaga Pariwisata Nusa, Kepala bidang Kepemanduan Lembaga Pariwisata Nusa, Ketua tuha peut desa, dan imam meunasah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan peran pemerintah desa meliputi pembentukan dan pengoptimalan kinerja LPN, Koordinasi dan musyawarah antar lembaga, eksekusi program pelayanan surat-menyurat, monitoring, fasilitator dan bantuan relasi kerjasama antar lembaga desa dan non desa. Sementara itu peran LPN meliputi, koordinasi dan musyawarah, pelaksanaan sosialisasi yang meliputi kegiatan door to door, gotong-royong, pemberdayaan ibu-ibu PKK, regulasi *reward and punishment* pemberian fasilitas kebersihan kepada masyarakat, dan penyelenggaraan event-event lingkungan. Disamping itu peran dari imam meunasah meliputi, pemberian sosialisasi tata cara mengelola lingkungan berdasarkan Al Quran dan hadist. Sementara itu

tuha peut desa memiliki peran sebagai pengawas dan penasehat agar seluruh kegiatan tetap berada pada nilai adat, budaya, tradisi dan syariat. Bentuk kerja sama antar pemerintah desa, LPN dan tokoh masyarakat meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, serta *check and balance*. Sehingga kewarganegaran lingkungan yang ada pada Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar dapat tercipta dan terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Peduli Lingkungan, Desa Nusa, Lembaga Pariwisata Nusa.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) secara garis besar berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini tecermin dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi ‘’ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal tersebut diatur secara jelas agar Warga Negara Indonesia (WNI) mampu berperan aktif dalam melestarikan lingkungan. Inti dari peraturan tersebut adalah bagaimana manusia dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya lingkungan secara arif dan bijaksana tanpa harus merusaknya. Warga negara yang baik tidak hanya memiliki pengetahuan tentang lingkungan yang baik, namun juga dapat berpartisipasi dalam mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik. Dalam pelaksanaannya tentu dibutuhkan sinergitas antara WNI dan lembaga-lembaga yang berwenang, sehingga diharapkan pelestarian lingkungan yang terwujud dalam karakter peduli lingkungan dapat tercipta dengan baik dan efisien. Sudah seharusnya birokrasi pemerintah beserta lembaga-lembaga pengelola lingkungan mendorong kebijakan-kebijakan yang sentral dalam membentuk sikap dan karakter peduli lingkungan demi terbentuknya karakter peduli lingkungan. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut tentunya dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga lingkungan, tokoh-tokoh desa dan berbagai pihak lain guna mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintah desa.

Salah satu desa yang memiliki penerapan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan berbasis lingkungan yang baik berdasarkan website jadesta.com/adwi2021 jejaring desa wisata atau jadesta Kemenparekraf RI adalah Desa Nusa. Nusa adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh besar, Provinsi Aceh. Nusa merupakan salah satu diantara desa di Aceh yang terus bergerak mengembangkan wisata berbasis masyarakat. Pada tahun 2021, Desa Nusa berhasil meraih juara pertama kategori homestay pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Dilansir dari situs resmi jejaring desa wisata atau jadesta oleh Kemenparekraf RI, salah satu indikator pemenang ajang ADWI dikarenakan adanya penilaian pada kategori CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*). CHSE adalah sebuah kategori penilaian di mana, Desa peserta harus bisa menunjukkan keunggulan mereka dari segi kebersihan dalam segala bidang, demi terbentuknya lingkungan bersih, kelestarian lingkungan terjaga, dan bebas dari berbagai virus, terutama Covid 19. Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar telah banyak menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam upaya pelestarian lingkungan.

Menurut Mac. Gregor (et. al., 2004:4-7) dengan melihat indikator seperti, pengembangan keterampilan kewarganegaraan dan keahlian partisipatif dalam mengelola lingkungan, perubahan gaya hidup yang selaras dengan pelestarian lingkungan, kegiatan melibatkan warga dalam menentukan kebijakan lingkungan serta terkontrolnya masyarakat karena aturan lingkungan, maka sebuah wilayah sudah dapat digolongkan menerapkan konsep karakter peduli lingkungan dengan optimal. Pada tahap observasi awal penulis tentunya telah melihat berbagai indikator tersebut telah ada pada Desa Nusa, namun hanya secara sederhana, tanpa adanya observasi secara mendalam. Oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian terkait, pembentukan karakter peduli lingkungan pada Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang berkualitas, berkaitan dengan konsep dan praktik gerakan *ecological citizenship* oleh desa terkait. Muara dari penelitian ini juga

diharapkan menjadi referensi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan masyarakat yang partisipatif (*civic participation*) dalam program pembangunan lingkungan hidup (ekologi), sehingga diharapkan upaya-upaya pembentukan konsep karakter peduli lingkungan dan berbagai terobosan baru dalam pelestarian lingkungan yang ada di desa tersebut menjadi trendsetter desa-desa di seluruh Aceh, sehingga dapat tercipta kelestarian lingkungan yang baik dan terjaga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sumber data dalam penelitian berjumlah 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Umum Lembaga Pariwisata Nusa, Kepala bidang Kepemanduan Lembaga Pariwisata Nusa, Ketua tua peunt desa, dan imam meunasah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN DISKUSI

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa sangat strategis dan kompeten. Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa sangat menyadari berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Dengan demikian lahirlah peran-peran strategis di dalamnya guna membentuk masyarakat untuk menjaga sumber daya alam yang ada dengan baik dan terjaga. Tindakan tersebut tentunya sesuai dengan teori Robert Malthus (1834) yang menyatakan bahwa produktivitas mengelola sumber daya alam harus ditingkatkan, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat dikelola dengan pembentukan karakter dan sikap peduli lingkungan. Dengan adanya kesadaran Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa dalam menggiatkan berbagai program pengelolaan lingkungan, tentunya diperlukan keterlibatan dan sinergitas di dalam masyarakat. Salah satu metode yang paling efektif yaitu dengan membentuk karakter peduli lingkungan atau dalam istilah lebih sederhana yaitu sikap peduli serta menjaga lingkungan. Peran Pemerintah Desa Nusa yang pertama dalam membentuk karakter peduli lingkungan atau dalam istilah lebih sederhana disebut sikap peduli serta menjaga lingkungan adalah dengan membentuk sebuah lembaga yang memiliki keahlian, pengetahuan dan dedikasi yang bergerak di bidang lingkungan. Lembaga tersebut bernama Lembaga Pariwisata Nusa.

Pemerintah Desa Nusa sadar akan perlunya mengedukasi masyarakat dan menjadikan karakter dan etika masyarakat menjadi lebih baik harus dimulai dengan membentuk lembaga yang paham akan lingkungan. Dengan demikian, tugas dan wewenang pemerintah desa yang begitu kompleks akan lebih mudah terselesaikan, sehingga berbagai visi misi desa dalam membentuk sikap dan perilaku peduli lingkungan dapat tersalurkan melalui lembaga yang diciptakan. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu: "Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Hal ini juga diperkuat oleh observasi yang dilakukan peneliti, di mana Lembaga Pariwisata Nusa sudah terbentuk dan memiliki surat keputusan dan legalitas oleh pemerintah desa. Namun pada tahap observasi, peneliti tidak dapat melihat surat keputusan dan legalitas LPN, karena surat sudah dalam keadaan rusak dan masih dalam tahap pembuatan surat yang baru. Ketiadaan surat tersebut menjadikan bukti dokumentasi terkait surat keputusan pembentukan LPN tidak dapat diperoleh. Peran kedua dari pemerintah desa dalam pembentukan karakter peduli lingkungan adalah melakukan koordinasi dan musyawarah dengan Lembaga Pariwisata Nusa mengenai berbagai rencana dan usulan terkait hal-hal yang diperlukan. Koordinasi dan musyawarah dapat direncanakan pada musyawarah pembangunan desa (MUSREMBANGDES) dan rapat rutin setiap satu bulan sekali. Pada tahap ini pemerintah desa melaksanakan kegiatan musyawarah guna menemukan ide, gagasan, solusi serta perencanaan kebijakan tertentu yang membantu kegiatan pengelolaan lingkungan. Musyawarah turut dihadiri oleh perwakilan masyarakat, Lembaga Pariwisata Nusa dan tokoh masyarakat.

Hal tersebut tentunya sangat sesuai dengan pendapat Leo Agustino (2008:7) yang mengungkapkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan-

hambatan dan kemungkinan-kemungkinan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Hal demikian diperkuat dengan observasi yang dilakukan peneliti, di mana proses musyawarah dalam rapat yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama berbagai pihak telah sesuai dengan prosedur yang dijelaskan oleh kepala desa dan sekretaris pada tahap wawancara dan juga diperkuat dengan bukti dokumentasi yang dilakukan peneliti saat melihat langsung proses rapat desa. Kemudian, peran dari pemerintah desa yang ketiga adalah melakukan eksekusi terhadap berbagai usulan yang telah disampaikan dan disetujui dalam agenda rapat dan musyawarah pembangunan desa. Peran tersebut meliputi pemberian pelayanan surat menyurat kepada Lembaga Pariwisata Nusa dan tokoh masyarakat. Kebijakan tersebut berfungsi dalam mengadakan hubungan secara terus-menerus antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Pelayanan surat-menyurat ini disebut juga dengan istilah korespondensi. Berdasarkan hasil pengamatan observasi, peneliti melihat kegiatan surat-menyurat berjalan dengan efektif dan terstruktur. Kegiatan tersebut juga dibuktikan dengan adanya bukti dokumentasi.

Peran dari Pemerintah Desa yang keempat adalah melakukan pengawasan dan monitoring penuh terhadap Lembaga Pariwisata Nusa. Monitoring berfungsi sebagai pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, serta memantau perubahan, proses, dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang lembaga inginkan. Berdasarkan observasi, peneliti melihat bahwa monitoring pemerintah desa terhadap Lembaga Pariwisata Nusa sangat baik, di mana para perangkat desa silih berganti mengawasi kondisi desa dan kinerja seluruh anggota LPN, setidaknya dalam kurun waktu sebulan sekali. Kegiatan tersebut juga dibuktikan dengan adanya bukti dokumentasi. Peran dari pemerintah desa yang kelima sebagai fasilitator terhadap berbagai kegiatan Lembaga Pariwisata Nusa dan tokoh masyarakat. Pemerintah Desa berusaha membantu dan memahami tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut, tanpa mengambil posisi tertentu dalam sebuah status. Hal tersebut tentunya selaras dengan pendapat Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson (2014:164) di mana kerjasama sangat diperlukan di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal. Kerja sama atau belajar bersama adalah proses beregu dan berkelompok di mana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai hasil yang telah disepakati. Berdasarkan pengamatan observasi, peneliti melihat pemerintah desa sangat antusias dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan LPN. Mulai dari sarana dan prasarana seperti tenda, kursi, konsumsi, dan bantuan relawan. Kegiatan tersebut tersebut juga dibuktikan dengan adanya bukti dokumentasi. Peran dari pemerintah desa yang keenam yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga yang ada di luar desa. Hal ini bertujuan untuk mendapat dukungan baik dari segi finansial, edukasi, pengalaman dan promosi menuju tingkat yang lebih tinggi.

Kegiatan tersebut tentunya selaras dengan Teori Jager dan Kreutzer (2011:1025) yang mengungkapkan bahwa dalam pembentukan kebijakan, dan berbagai kegiatan direncanakan, sebuah lembaga, organisasi ataupun pemerintah perlu mendapat dukungan legitimasi dari pihak lain dalam mendorong program. Hal tersebut tentunya sesuai dengan bukti dokumentasi berupa arsip yang dimiliki oleh Desa Nusa. Tentunya pemerintah desa mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan karakter peduli lingkungan, walaupun bukan pelaksana utama dalam pembentukan karakter peduli lingkungan, namun pemerintah desa memiliki fungsi utama sebagai monitoring dan fasilitator terhadap Lembaga Pariwisata Nusa yang berperan sebagai lembaga eksekutor terhadap gerakan karakter peduli lingkungan dan ecological citizenship. Pemerintah desa tentunya telah bekerja dengan baik dalam proses pembentukan karakter peduli lingkungan sesuai dengan standar operasional yang telah direncanakan.

Namun berbagai peran yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak akan berhasil tanpa adanya sinergitas dan dukungan dari Lembaga Pariwisata Nusa sebagai lembaga eksekutor utama gerakan karakter peduli lingkungan dan ecological citizenship. Oleh karena itu, peneliti akan membahas bagaimana peran Lembaga Pariwisata Nusa dalam pembentukan karakter peduli lingkungan pada Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Peran dari Lembaga Pariwisata Nusa yang pertama dalam pembentukan karakter peduli lingkungan atau dalam istilah lebih sederhana disebut sikap warga negara peduli lingkungan adalah menyerap berbagai aspirasi dari pemerintah desa dan beberapa tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat yang sudah memberikan ide, gagasan, dan solusi pada musrembangdes. Dengan demikian, berbagai gerakan karakter peduli lingkungan/*ecological citizenship* yang dihasilkan oleh Lembaga Pariwisata Nusa kedepannya harus

dikalaborasi dengan hasil musyawarah desa. Hal tersebut tentunya selaras dengan teori Mulgan (2009:4-5) di mana setiap strategi yang ingin dilakukan harus melalui tahap perumusan yang terdiri dari tujuan, lingkungan, arah, aksi, dan pembelajaran. Diperlukan keseriusan dan pertimbangan yang baik dan matang, agar strategi selaras dengan tujuan yang diinginkan dan dicapai. Hal tersebut tentunya sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan saat agenda musyawarah lembaga desa, disertai bukti dokumentasi yang ada. Peran Lembaga Pariwisata Nusa yang kedua dalam melakukan praktek gerakan karakter peduli lingkungan/*ecological citizenship* berdasarkan hasil musyawarah internal dan eksternal dengan lembaga desa dan LPN sendiri. Lembaga Pariwisata Nusa melakukan gerakan peduli lingkungan pada lingkup mereka tersendiri. Lembaga Pariwisata Nusa melakukan aksi bertema “ku anfusakum wa ahlikum nara”, di mana LPN berusaha memberikan contoh sebelum memberikan instruksi. LPN melakukan aksi menyapu jalanan desa, membersihkan kantor desa, masjid, sekretariat LPN, dan sampah-sampah yang berserakan di jalan.

Kegiatan tersebut dilakukan guna memberikan kesan dan contoh yang baik kepada masyarakat dengan menjadikan LPN sebagai instruktur pengelolaan lingkungan. Kegiatan ini telah dilakukan pada tiga periode pemerintahan desa, namun keberhasilan baru tercipta mulai pada awal tahun 2017. Kegiatan tersebut dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan yang ada. Kegiatan tersebut tentunya didukung oleh bukti dokumentasi yang ada. Peran dari Lembaga Pariwisata Nusa yang ketiga dalam pembentukan karakter peduli lingkungan dengan melakukan eksekusi program yang terdiri dari konsep edukasi dan sosialisasi yang bernama “*door to door*”. Konsep ini diterapkan oleh seluruh elemen LPN dengan pola membersihkan rumah-rumah yang dikategorikan kotor dan memiliki sampah yang berserakan. Proses pembersihan rumah-rumah dilakukan dengan sukarela agar masyarakat terketuk hatinya serta menimbulkan efek malu pada masyarakat.

Tujuan dari program tersebut adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memiliki lingkungan rumah yang bersih dan steril dari sampah. Peran dari Lembaga Pariwisata Nusa yang keempat adalah merutinkan kegiatan gotong royong setiap satu bulan sekali bagi masyarakat desa dan satu bulan dua kali untuk anggota Lembaga Pariwisata Nusa. Kegiatan gotong-royong ini diwajibkan kepada seluruh masyarakat Desa Nusa dan anggota Lembaga Pariwisata Nusa, yang dikoordinir oleh kepala dusun dan kepala Lembaga Pariwisata Nusa. Gotong royong juga dapat dilakukan secara tiba-tiba apabila terdapat laporan akan ada wisatawan yang berkunjung. Menurut hasil observasi yang peneliti lakukan, masyarakat dan Lembaga Pariwisata Nusa sangat antusias terhadap kegiatan gotong-royong bersama. Kegiatan tersebut juga dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan yang ada. Peran Lembaga Pariwisata Nusa yang kelima yaitu, dengan memberikan fasilitas dan alat kebersihan berupa sapu, tong sampah, sodokan dan beberapa alat yang menunjang kegiatan bersih-bersih pada lingkup desa yang diperoleh dari kerjasama dengan PT. Semen Andalas Indonesia. sehingga masyarakat dapat memiliki alat-alat kebersihan secara gratis. Berdasarkan hasil pengamatan observasi, peneliti melihat bahwa secara keseluruhan setiap rumah memiliki ketersediaan fasilitas dan alat kebersihan yang lengkap. Hal tersebut juga dibuktikan dengan bukti dokumentasi yang ada. Peran dari Lembaga Pariwisata Nusa yang keenam yaitu menggerakkan ibu-ibu dalam Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memperkuat edukasi peduli lingkungan.

Di mana pada kegiatan tersebut ibu-ibu PKK disosialisasi mengenai mekanisme pengelolaan lingkungan selama enam bulan dan wajib mempraktekkan konsep edukasi LPN mengenai pengelolaan lingkungan di tingkat rumah masing-masing. Kondisi ini terkait dengan peran seorang ibu yang lebih strategis dalam keluarga dibandingkan dengan peran ayah dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah. Kegiatan ini tentunya dibuktikan dengan hasil dokumentasi yang ada. Peran Lembaga Pariwisata Nusa yang ketujuh yaitu menerapkan kegiatan yang bernama reward and punishment, di mana setiap masyarakat yang memiliki rumah yang kotor akan dikenai sanksi berupa denda, dan beberapa rumah terbaik akan diberikan hadiah pada acara tahunan Nusa *Award*. Program ini dilakukan guna meningkatkan konsistensi dan semangat masyarakat dalam mengelola lingkungan. Sedangkan peran terakhir yang dilakukan oleh LPN yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga luar seperti PT. Semen Andalas Indonesia dalam bidang pengadaan fasilitas kebersihan, DLHK Kabupaten Aceh Besar dalam pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara, Kryad Muraya dalam pelatihan *public speaking*, Kementerian Keuangan Provinsi Aceh dalam kerjasama belajar mengajar, Chulangkorn University dalam kerjasama dan kunjungan beberapa civitas akademika, Si Bolang Trans 7 dalam kerjasama promosi wisata dan keindahan desa, Jambore bersama

BEM Universitas Syiah Kuala, Dinas PUPR Kabupaten Aceh Besar dalam kerjasama pengelolaan air bersih. Kegiatan-kegiatan bertema lingkungan pun terselenggara dengan baik dan berhasil seperti nusa *award*, nusa festival, nusa karnaval, nusa hijau, kemah santri, dan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut secara garis besar bertujuan guna meningkatkan dan membangkitkan semangat serta terbentuknya standarisasi sikap, karakter, dan etika masyarakat Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar dalam mengelola lingkungan dan pelestarian lingkungan. Kegiatan kerjasama ini juga turut dibantu oleh Pemerintah Desa, dan pihak pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan kerja sama tersebut juga dibuktikan dengan bukti dokumentasi dan arsip Lembaga Pariwisata Nusa. Berbagai peran Lembaga Pariwisata Nusa tersebut, tentunya selaras dengan teori pendekatan Antropocentric dalam pembentukan karakter peduli lingkungan oleh Smith and Pangsap (2010:47) yang memberikan gambaran tentang pentingnya pembentukan club atau komunitas dalam masyarakat, yakni Lembaga Pariwisata Nusa.

Selanjutnya juga dibutuhkan kontribusi masyarakat (*respect for person*), di mana masyarakat sebagai penggerak utama dan tumpuan utama dalam penyelenggaraan pelestarian lingkungan. Masyarakat dituntut untuk mendukung dan mematuhi segala instruksi yang diberikan oleh komunitas. Pada tahap ini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya dibutuhkan konsep pemusatan pada masyarakat (*Human Centredness*), di mana konsep tersebut dapat dilihat dari adanya pemusatan kegiatan-kegiatan lingkungan yang diselenggarakan demi terbentuknya karakter dan etika masyarakat Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Tahap selanjutnya berkaitan dengan konsep instrumental *values*, tahap yang memiliki relevansi kausalitas dengan human centredness di mana masyarakat harus memiliki kepekaan dan juga aksi nyata dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup.

Adapun yang terakhir berkaitan dengan konsep *right for the personal*, di mana lembaga dan organisasi berhak untuk mengarahkan pembangunan lingkungan hidup sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Konsep ini dapat dilihat dari pembentukan sikap dan perilaku peduli lingkungan yang sengaja dibentuk guna membangun Desa Nusa menjadi desa dengan kualitas lingkungan yang baik dan terjaga. Hal ini tentunya dapat dicapai karena adanya kerja keras dari Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa telah bekerja sangat optimal dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan pada musrembangdes. Di mana sebelum tahun 2012, disaat belum adanya Lembaga Pariwisata Nusa dan koordinasi serius dari pemerintah desa, Nusa belum menjadi desa dengan kualitas lingkungan seperti saat ini. Dengan kerja sama dan kerja keras dari berbagai pihak, pada tahun 2015, Desa Nusa dideklarasikan menjadi desa wisata, hingga memenangkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2021. Seluruh elemen bekerja dengan baik dan luar biasa terutama seluruh tim dari LPN selaku eksekutor pembina karakter peduli lingkungan.

Sehingga masyarakat Desa Nusa berhasil memiliki karakter, etika dan sikap peduli lingkungan yang sudah tertanam dalam diri dan menjadi *internalized value* dalam diri mereka. Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa yang ada di Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar tentunya memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Dedy Ari Nugroho dengan judul “Konsep *Ecological Citizenship* Dalam Program Kotaku” Dimana pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku pemangku kepentingan di tingkat daerah, menyelenggarakan berbagai strategi penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui 6 kegiatan inti antara lain: (1) Sosialisasi, (2) Penggalangan partisipan, (3) Pelatihan, (4) Pemberian Reward, (5) Monitoring/ Uji petik, (6) Evaluasi. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Mariyani dengan judul “Strategi Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis” pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta di mana Pembentukan kewarganegaraan ekologis melalui masyarakat akan lebih efektif apabila lembaga yang berwenang membentuk komunitas atau penggiat lingkungan untuk mencapai tujuan kewarganegaraan ekologis. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya Lembaga Pariwisata Nusa yang ada di Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Namun penelitian Dedy Ari Nugroho dengan judul “Konsep *Ecological Citizenship* Dalam Program Kotaku” juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di mana dalam Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh besar memiliki lembaga khusus yang bertugas melakukan pengelolaan lingkungan, yang bernama Lembaga

Pariwisata Nusa atau (LPN), yang di mana konsep *Ecological Citizenship* Dalam Program Kotaku” oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki lembaga khusus pengelolaan lingkungan, melainkan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLHK).

SIMPULAN

Peran dari pemerintah desa dan Lembaga Pariwisata Nusa dalam pembentukan kewarganegaraan lingkungan pada Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, maka dapat diketahui bahwa pemerintah desa dan lembaga pariwisata memiliki peran yang sangat strategis dan sentral. Di mana program-program, dan rancangan kegiatan tersusun secara terstruktur dan terlaksana dengan baik. Program-program kegiatan dilakukan dengan saling bekerjasama dengan prinsip gotong royong demi terciptanya sikap dan perilaku masyarakat yang menjaga lingkungan atau yang disebut kewarganegaraan lingkungan. Peran yang dilakukan pemerintah desa meliputi pembentukan dan pengoptimalan kinerja terhadap LPN, melakukan musyawarah rancangan program bersama LPN dan tokoh masyarakat, pelayanan surat menyurat kepada LPN dan tokoh masyarakat, pengawasan/ monitoring kinerja LPN, penasehat LPN, Membangun relasi dan kerja sama dengan lembaga luar desa, dan yang terakhir sebagai fasilitator LPN dalam membentuk sikap dan perilaku peduli lingkungan. Sementara Peran dari Lembaga Pariwisata Nusa sendiri dalam pembentukan kewarganegaraan lingkungan yaitu, melakukan koordinasi dan rencana pelaksanaan program bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi seperti program *door to door*, pelaksanaan kegiatan gotong-royong rutin bagi masyarakat desa, pemberian fasilitas kebersihan kepada masyarakat desa, menggerakkan ibu-ibu PKK dalam pelatihan pengelolaan lingkungan, pemberlakuan program *reward and punishment*. Lembaga pariwisata juga membangkitkan semangat masyarakat desa dengan menyelenggarakan event-event seperti Nusa hijau, Nusa festival, Nusa Karnaval, Nusa Award, Kemah santri, youthcamp, dan berbagai kegiatan lainnya. Dampak dari berbagai program yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa telah membuat pengaruh positif bagi masyarakat Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar sehingga terbentuklah warga negara yang memiliki sikap dan perilaku peduli lingkungan, atau yang disebut dengan kewarganegaraan lingkungan.

Adapun peran tokoh-tokoh masyarakat dalam pembentukan kewarganegaraan lingkungan pada Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar turut memberikan dampak yang sangat positif terhadap masyarakat desa. Tokoh-tokoh desa yang terdiri dari tuha peut dan imam meunasah turut membentuk sikap dan perilaku peduli lingkungan terhadap masyarakat Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Peran dari tuha peut sendiri adalah dengan mengawasi, dan melakukan pemberi nasehat terhadap berbagai hal yang dianggap perlu pada pemerintah desa dan Lembaga Pariwisata Nusa. Hal ini tentunya karena tuha peut memiliki posisi yang dianggap memiliki kehormatan secara adat, tradisi, dan budaya, serta syariat. Sehingga berbagai kegiatan dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan LPN selalu diawasi oleh tuha peut. Disamping itu imam meunasah sebagai tokoh agama yang memiliki kedudukan yang sakral di dalam masyarakat secara syariat dianggap sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan dan ilmu keagamaan paling baik dan paling dekat dengan tuhan. Dengan begitu imam meunasah berupaya untuk memberikan sosialisasi keagamaan mengenai tata cara hidup bersih dan menjaga lingkungan berlandaskan syariat islam. Dengan demikian tuha peut dan imam meunasah dapat saling membantu dan bekerjasama demi terbentuknya warga negara peduli lingkungan atau yang disebut dengan kewarganegaraan lingkungan.

Dalam pembentukan kewarganegaraan lingkungan pada Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa dan tokoh-tokoh masyarakat tentunya menjalin hubungan kerjasama guna mempermudah pembentukan sikap dan perilaku peduli lingkungan pada masyarakat desa. Seluruh elemen masyarakat bekerjasama dan saling bergotong royong dalam membentuk desa dengan kualitas lingkungan yang terjaga. Bentuk-bentuk kerjasama antara Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa dengan tokoh masyarakat meliputi bidang perencanaan, di mana pemerintah desa, LPN, tuha peut, imam meunasah saling bertukar pendapat, ide dan gagasan dalam bermusyawarah guna persiapan pembentukan sikap dan perilaku peduli lingkungan. Kerja sama yang kedua, Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa selalu diawasi dan diberikan nasehat oleh para tuha peut dan imam meunasah dalam seluruh aktivitas kegiatan yang dilakukan, dan sebaliknya pemerintah desa dan LPN senantiasa membantu, mendukung dan memfasilitasi tokoh masyarakat dalam aktivitas dalam menjalankan kegiatan pembentukan kewarganegaraan lingkungan. Kerjasama ketiga meliputi kerjasama dibidang administrasi, pemberian izin, dan mengurus berbagai keperluan LPN, tuha peut, dan imam meunasah oleh pemerintah desa dalam kegiatan-kegiatan pembentukan kewarganegaraan lingkungan. Di mana dasar kerjasama tersebut

guna menjadikan Desa Nusa sebagai desa wisata ramah lingkungan dengan diiringi sikap dan perilaku masyarakatnya yang peduli terhadap lingkungan atau dalam istilah lain disebut kewarganegaraan lingkungan. Sehingga Diharapkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa dan tokoh masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dan kerjasama dalam pembentukan kewarganegaraan lingkungan pada Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Mengingat belum sepenuhnya masyarakat Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar memiliki sikap dan perilaku peduli lingkungan, maka pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa wajib meningkatkan kinerja dan tidak berpuas diri dalam melakukan gerakan-gerakan ecological citizenship atau kewarganegaraan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas juga diharapkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa dan tokoh masyarakat untuk lebih giat mensosialisasikan kegiatan-kegiatan peduli lingkungan pada desa-desa tetangga, dengan bekerjasama dan melakukan bantuan edukasi, pelatihan, dan motivasi, mengingat desa-desa tetangga yang ada di sekitar Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar masih tertinggal jauh dari Desa Nusa. Dikarenakan desa-desa tetangga memiliki potensi yang sama untuk bisa menjadi seperti Desa Nusa, yang bergerak menjadi Desa Wisata dengan memusatkan perhatian pada terbentuknya sikap dan perilaku masyarakat desa yang baik dan aktif menjaga lingkungan. Selanjutnya diharapkan masyarakat Desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar untuk lebih aktif, partisipatif, dan komunikatif dalam mendukung berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, Lembaga Pariwisata Nusa, tuha peut, dan imam meunasah. Dikarenakan ada beberapa masyarakat yang masih tidak mengindahkan nilai dan norma desa, tidak ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan peduli lingkungan, dan tidak menutup diri dari berbagai sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa dan tokoh masyarakat. Dan yang paling akhir diharapkan Pemerintah Desa dan Lembaga Pariwisata Nusa dan tokoh masyarakat untuk lebih giat bekerjasama dengan lembaga-lembaga luar desa yang memiliki keahlian, pengalaman dan fasilitas untuk pengelolaan lingkungan yang baik. Agar memudahkan dalam pembentukan kewarganegaraan lingkungan dalam jangka waktu kedepan, sehingga Desa Nusa dapat membanggakan Aceh di tingkat nasional dan membanggakan Indonesia di tingkat Internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu secara pemikiran, *support* (menyemangati), dan do'a sehingga artikel penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Artikel ini dirasa jauh dari kata sempurna oleh karena itu kepada pembaca mohon saran dan masukannya kedepan demi kesempurnaan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfa Beta.
- Johnson, Elaine B. 2011. *Contextual Teaching And Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar Mengajar Mengasyikkan Dan Bermakna*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Jagers., et al. (2014). Ecological Citizenship: A Driver of Pro-Environmental Behaviour?. *Environmental Politics*, 23 (3), 434–453.
- Keulartz, J. (2018). Does Deliberation Promote Ecological Citizenship? The Convergence Hypothesis and the Reality of Polarization. Dalam. S. Sarkar and B. A. Minteer (eds.). *A Sustainable Philosophy The Work of Bryan Norton*, The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics.
- Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson. 2014. *Contextual Teaching Learning*, Jakarta: Mizan Media Utama
- McGregor. Sherilyn (2004) krom Care to Citizenship: calling Ecofeminism Bad to Politics. *Ethnic & The Environment* 9(1)2004. *Indiana University Pres*
- Mulgan, G. (2009). *The art public strategy: mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford: University Press.
- Nugroho, Dedy Ari. 2021. *Ecological Citizenship, kewarganegaraan lingkungan dalam perspektif teori dan riset*. Jawa Tengah: CV. Amerta Media.
- Smith, M.J., & Pangsap, P. (2008). *Environment citizenship integratif Justice, responsibility, and civic engagement*. London: Zed Books

Yusuf, Rusli dkk. 2020. Hubungan Antara Kewarganegaraan Lingkungan Terhadap Perilaku lingkungan Siswa Di Sekolah Adiwiyata. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10 (1): 4